



Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Lingkar Tambang: Skill Mismatch, Ketimpangan Kesempatan Kerja, Dan Perubahan Sosial Di Desa Samaenre

Chayrunnisa Zalzabila¹, Andi Jam'an², Ismail Rasulong³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

¹chayrunnisazalzabila@gmail.com, ²andi.jam'an@unismuh.ac.id, ³ismail.rasulong@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi sosial ekonomi masyarakat Desa Samaenre, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka akibat aktivitas pertambangan PT Ceria Nugraha Indotama serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perubahan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap enam informan yang dipilih secara purposif, meliputi petani, pekerja tambang, pelaku usaha, ibu rumah tangga, pemerintah desa, dan perwakilan perusahaan. Analisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, sedangkan kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan transformasi yang bersifat asimetris. Pertambangan mendorong peralihan sebagian tenaga kerja dari pertanian ke pekerjaan tambang, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menghasilkan efek pengganda melalui pertumbuhan warung, perdagangan, rumah sewa, dan jasa lokal. Namun, manfaat tersebut disertai kenaikan biaya hidup, perbedaan daya beli, terbatasnya akses masyarakat lokal terhadap pekerjaan formal, dan perubahan hubungan sosial. Skill mismatch yang bersumber dari rendahnya pendidikan, keterampilan teknis, pengalaman, dan sertifikasi menjadi mekanisme yang menghubungkan perubahan struktur ekonomi dengan pengangguran struktural, ketimpangan kesempatan, kecemburuan sosial, dan melemahnya kohesi masyarakat. Temuan menegaskan bahwa pembangunan pertambangan yang inklusif memerlukan pelatihan vokasional, sertifikasi, transparansi rekrutmen, penguatan UMKM, pengadaan lokal, dan program tanggung jawab sosial perusahaan yang partisipatif dan berjangka panjang.

Kata Kunci: Dinamika Sosial Ekonomi, Pertambangan, Perubahan Struktur Ekonomi, Skill Mismatch, Konflik Sosial

1. Pendahuluan

Sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam pembangunan wilayah karena mampu menarik investasi, memperluas basis penerimaan daerah, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru. Kehadiran industri ekstraktif umumnya diharapkan tidak hanya menghasilkan nilai tambah dari produksi mineral, tetapi juga menimbulkan dampak lanjutan melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, pengadaan barang dan jasa lokal, serta tumbuhnya berbagai usaha pendukung. Meskipun demikian, peningkatan produksi dan investasi tidak selalu diikuti oleh distribusi kesejahteraan yang merata. Masyarakat yang bermukim di sekitar tambang dapat memperoleh peluang ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga menghadapi perubahan mata pencaharian, kenaikan biaya hidup, tekanan lingkungan, dan pergeseran hubungan sosial.

Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan sangat bergantung pada cara manfaat dan risiko didistribusikan. Nguyen, Boruff, dan Tonts (2018) menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap pertambangan dipengaruhi oleh kondisi geografis, karakter demografis, pengalaman historis, dan konteks budaya komunitas. Oleh karena itu, industri pertambangan yang sama dapat dipersepsikan secara berbeda oleh kelompok masyarakat yang berlainan. Kowasch (2018) juga menemukan bahwa pembangunan pertambangan nikel dapat membuka peluang kerja dan mendukung pemberdayaan ekonomi, tetapi manfaat tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan apabila hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ketika ekonomi lokal terlalu bergantung pada satu industri ekstraktif, wilayah tersebut dapat mengalami kutukan sumber daya pada tingkat lokal berupa lemahnya diversifikasi, tingginya ketergantungan terhadap perusahaan, dan meningkatnya kerentanan terhadap perubahan harga komoditas maupun siklus produksi (Suutarinen, 2015).

Desa Samaenre merupakan salah satu wilayah yang berada di sekitar kegiatan PT Ceria Nugraha Indotama di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Kedekatannya dengan kawasan pertambangan menjadikan desa ini tidak hanya sebagai tempat tinggal sebagian pekerja, tetapi juga sebagai lokasi berkembangnya perdagangan, jasa, rumah sewa, dan sumber tenaga kerja potensial bagi perusahaan. Sebelum aktivitas pertambangan berkembang secara intensif, masyarakat umumnya menggantungkan penghidupan pada sektor perkebunan, pertanian, perikanan, serta kegiatan ekonomi rumah tangga. Masuknya industri pertambangan kemudian memperluas pilihan

pekerjaan dan meningkatkan peredaran uang melalui pembayaran upah, konsumsi pekerja, penyewaan tempat tinggal, perdagangan eceran, dan berbagai jasa lokal.

Namun, perubahan tersebut tidak dialami secara setara oleh seluruh masyarakat. Warga yang berhasil memenuhi persyaratan rekrutmen perusahaan memperoleh pendapatan bulanan yang relatif lebih stabil dibandingkan pendapatan dari perkebunan yang bergantung pada musim, hasil panen, dan fluktuasi harga komoditas. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah, keterampilan teknis terbatas, pengalaman industri yang minim, atau tidak memiliki sertifikasi keselamatan cenderung menghadapi kesulitan untuk memasuki pekerjaan formal di sektor pertambangan. Persaingan dengan tenaga kerja pendatang yang lebih berpengalaman dan telah memenuhi kualifikasi perusahaan semakin mempersempit peluang sebagian tenaga kerja lokal. Dengan demikian, persoalan utama tidak semata-mata terletak pada tersedia atau tidaknya lowongan kerja, tetapi pada kesesuaian antara kompetensi masyarakat lokal dan standar pekerjaan industri.

Perubahan ekonomi tersebut juga membawa konsekuensi sosial. Perbedaan pekerjaan, tingkat pendapatan, dan akses terhadap peluang perusahaan membentuk diferensiasi baru antara kelompok yang terhubung langsung dengan tambang dan kelompok yang tetap berada di luar sektor tersebut. Peningkatan daya beli pekerja tambang dapat memperbesar permintaan terhadap bahan pangan, tempat tinggal, transportasi, dan jasa. Akan tetapi, peningkatan permintaan yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan pasokan dapat mendorong kenaikan harga dan memperberat beban rumah tangga petani maupun kelompok non-tambang yang pendapatannya tidak mengalami peningkatan. Perbedaan kesempatan ekonomi tersebut juga berpotensi memengaruhi semangat gotong royong, hubungan bertetangga, serta kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Hui (2025) menunjukkan bahwa kekayaan tambang yang tumbuh cepat tetapi terdistribusi secara tidak merata dapat memunculkan kecemburuan dan mengubah orientasi moral masyarakat. Kwaleyela dan Larmer (2026) juga mengaitkan konflik di kawasan tambang dengan persepsi ketidakadilan dalam pembagian kekayaan serta rendahnya penyediaan manfaat sosial oleh perusahaan.

Kajian sebelumnya umumnya membahas perubahan mata pencaharian, ketimpangan ekonomi, pengembangan usaha lokal, dan konflik sosial sebagai tema yang berdiri sendiri. Penelitian ini berupaya menghubungkan seluruh proses tersebut melalui perspektif perubahan struktur ekonomi, pembangunan inklusif, dan perubahan sosial. Secara khusus, penelitian ini menempatkan skill mismatch sebagai mekanisme yang menjelaskan mengapa ekspansi pertambangan tidak selalu diikuti oleh penyerapan tenaga kerja lokal secara luas. Ketidaksesuaian keterampilan dapat membatasi akses pekerjaan, memperlebar perbedaan pendapatan, menimbulkan kecemburuan, dan pada akhirnya memengaruhi kohesi sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika sosial ekonomi masyarakat Desa Samaenre serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat terbentuknya transformasi yang lebih inklusif.

Pertambangan pada dasarnya merupakan bentuk industrialisasi berbasis sumber daya yang dapat mempercepat perubahan struktur ekonomi dan sosial wilayah. Masuknya modal, teknologi, tenaga kerja, dan sistem produksi berskala besar membuka pekerjaan formal serta menciptakan kegiatan ekonomi baru. Akan tetapi, proses tersebut juga mengubah penggunaan ruang, pola konsumsi, relasi kekuasaan, standar hidup, dan cara manfaat ekonomi didistribusikan. Nguyen, Boruff, dan Tonts (2018) menegaskan bahwa pengalaman masyarakat terhadap pertambangan tidak bersifat tunggal karena manfaat, risiko lingkungan, dan sejarah hubungan antara perusahaan dan komunitas tidak dialami secara seragam.

Temuan Kowasch (2018) memperlihatkan bahwa industri nikel dapat diarahkan untuk mendukung emansipasi ekonomi melalui kebijakan prioritas tenaga kerja lokal. Namun, keberadaan industri tidak selalu berhasil menciptakan kegiatan ekonomi alternatif, dan dalam beberapa keadaan justru memperlebar kesenjangan internal masyarakat. Suutarinen (2015) menyebut situasi tersebut sebagai kutukan sumber daya lokal, yaitu kondisi ketika ketergantungan terhadap ekstraksi menghasilkan struktur ekonomi yang sempit, menghambat diversifikasi, dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap keputusan perusahaan maupun perubahan harga mineral.

Dari perspektif perubahan struktur ekonomi, pembangunan dipahami sebagai perpindahan tenaga kerja dan sumber daya dari sektor tradisional yang berproduktivitas rendah menuju sektor modern yang menawarkan produktivitas dan pendapatan lebih tinggi. Mishra dan Pujari (2008) menunjukkan bahwa pertambangan dapat menurunkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong masyarakat beralih menuju pekerjaan yang berkaitan dengan tambang. Temuan serupa dikemukakan oleh Oladeji, Thomas, dan Ige (2010), yang menemukan bahwa keterbatasan pendapatan pertanian mendorong masyarakat memasuki sektor pertambangan dan mengembangkan berbagai usaha pendukung, seperti perdagangan makanan, pertukangan, dan usaha kecil.

Meskipun demikian, arah perubahan mata pencaharian tidak selalu berlangsung secara linier. Gräser (2024) menunjukkan bahwa pertambangan artisanal dapat mendorong perpindahan tenaga kerja, sedangkan pertambangan industri tertentu belum tentu menciptakan lapangan kerja lokal dalam jumlah besar. Foo dan Salim (2022) juga menegaskan bahwa pekerjaan pertambangan bersifat siklis dan dipengaruhi oleh perubahan ekonomi global. Ketika industri mengalami penurunan, pekerja tambang dapat kembali berpindah ke pertanian, konstruksi, manufaktur, atau sektor properti. Oleh sebab itu, perpindahan menuju sektor pertambangan belum tentu menjamin keamanan pekerjaan dalam jangka panjang.

Kemajuan teknologi dan restrukturisasi produksi juga memengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Gierańczyk dan Rachwał (2012) menunjukkan bahwa transformasi industri mengarah pada pengembangan sektor yang semakin intensif pengetahuan dan teknologi, sehingga perubahan kontribusi industri terhadap nilai tambah tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang sebanding.

Perbedaan produktivitas dan tingkat upah antarbidang pekerjaan kemudian menciptakan ketimpangan di tingkat lokal. Tleuberdinova et al. (2024) menemukan adanya kesenjangan upah yang besar antara sektor ekstraktif dan pertanian. Sementara itu, Deaton dan Niman (2012) menunjukkan bahwa pekerjaan tambang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka lebih panjang dapat berkaitan dengan peningkatan kemiskinan. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertambangan tidak cukup dinilai dari besarnya investasi, produksi, atau pendapatan pekerja. Pembangunan yang inklusif karena itu tidak cukup dinilai dari investasi dan produksi mineral, tetapi perlu mempertimbangkan pemerataan akses kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan usaha lokal, kualitas pelayanan, partisipasi masyarakat, kesehatan komunitas, ketahanan ekonomi wilayah, dan diversifikasi ekonomi pascatambang (Nelsen, Scoble, & Ostry, 2010; Jiao et al., 2021).

Salah satu manfaat ekonomi yang diharapkan muncul dari pertambangan adalah efek pengganda. Efek ini terjadi ketika pendapatan pekerja dan pengeluaran perusahaan meningkatkan permintaan terhadap makanan, transportasi, tempat tinggal, perdagangan, serta berbagai jasa lokal. Bainton dan Jackson (2020) menunjukkan bahwa pertambangan skala besar dapat menciptakan dan menopang sejumlah besar usaha lokal. Namun, ketergantungan usaha terhadap keberlanjutan operasi tambang menimbulkan persoalan karena usaha tersebut belum tentu bertahan setelah produksi menurun atau tambang ditutup. Adebayo dan Werker (2021) mengidentifikasi transfer keuangan, pekerjaan, dan peluang kontrak bagi pelaku usaha lokal sebagai saluran utama pembagian manfaat pertambangan. Efek pengganda tersebut tidak terbentuk secara otomatis. Fleming-Muñoz dan Poruschi (2025) menemukan bahwa manfaat ekonomi dari ledakan industri ekstraktif dapat berkurang ketika operasi semakin tidak padat karya dan keterkaitan dengan sektor lokal tetap terbatas. Oleh karena itu, pengembangan usaha masyarakat perlu didukung dengan pelatihan, akses permodalan, pendampingan manajemen, standarisasi produk, akses terhadap pengadaan perusahaan, dan diversifikasi pasar. Tanpa dukungan tersebut, usaha lokal hanya menjadi aktivitas sementara yang sangat bergantung pada konsumsi pekerja tambang.

Pada sisi ketenagakerjaan, industri pertambangan modern memerlukan keterampilan teknis, pengalaman operasional, sertifikasi, kemampuan menggunakan teknologi, dan pemahaman terhadap standar keselamatan. Sementara itu, penduduk sekitar tambang umumnya memiliki pengalaman kerja dalam pertanian, perkebunan, perdagangan kecil, dan sektor informal. Perbedaan tersebut menimbulkan skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kemampuan yang dimiliki tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Ba dan Jacquet (2022) menjelaskan bahwa karakter industri ekstraktif yang padat modal menyebabkan penciptaan pekerjaan lokal relatif terbatas. Oleh karena itu, kebijakan kandungan lokal seharusnya tidak berhenti pada prioritas rekrutmen, tetapi juga mencakup pelatihan, transfer teknologi, pengembangan pemasok lokal, dan peningkatan kemampuan masyarakat. Díaz (2025) menunjukkan bahwa tingkat informalitas yang tinggi mengurangi kemampuan wilayah dalam menyerap perubahan struktural. Geenen (2019) menambahkan bahwa distribusi pekerjaan dan kontrak lokal berlangsung dalam arena politik dan sosial yang kompleks. Apabila proses tersebut dikuasai oleh aktor yang memiliki modal, jaringan, dan akses kekuasaan, kebijakan lokal justru dapat melahirkan pola eksklusif baru.

Industrialisasi pertambangan juga memengaruhi nilai, identitas, pola interaksi, dan hubungan sosial di tingkat komunitas. Machlis, Force, dan Balice (1990) menemukan bahwa peningkatan aktivitas produksi sumber daya berkaitan dengan perubahan sistem sosial, meskipun pengaruhnya tidak selalu langsung dan dapat muncul secara bertahap. Speller dan Twigger-Ross (2009) menunjukkan bahwa perubahan lingkungan fisik dan sosial dapat mengurangi keterhubungan warga, memperlemah aliran informasi, menurunkan dukungan sosial, dan menggeser orientasi kolektif menuju kehidupan yang lebih individual.

Diferensiasi sosial semakin menguat ketika manfaat ekonomi terdistribusi secara tidak seimbang. Hui (2025) menunjukkan bahwa kekayaan yang timbul dari pertambangan dapat memunculkan kecemburuan dan mengubah lanskap moral masyarakat. Kwaleyela dan Larmer (2026) mengaitkan konflik komunitas tambang dengan persepsi ketidakadilan dalam pembagian keuntungan serta lemahnya manfaat sosial perusahaan. Dalam situasi tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan institusi menjadi sangat penting. Legitimasi pertambangan tidak hanya dibentuk oleh kepatuhan hukum, tetapi juga oleh keterbukaan informasi, keadilan prosedural, konsistensi dalam memenuhi komitmen, dan kemampuan perusahaan merespons keluhan masyarakat (Poudyal et al., 2025).

Transformasi yang lebih inklusif memerlukan kebijakan yang mengintegrasikan pengembangan tenaga kerja, penguatan usaha lokal, transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Gatune (2024) menjelaskan bahwa kebijakan kandungan lokal berpotensi meningkatkan pekerjaan, memperkuat industri setempat, dan memperluas transfer pengetahuan. Namun, efektivitasnya bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kualitas pelaksanaan. Korinek dan De Sa (2023) menegaskan bahwa kebijakan kandungan lokal sulit mencapai tujuan apabila tenaga kerja dan pemasok domestik belum memiliki kemampuan yang memadai.

Scott dan Gaskin-Peters (2022) menekankan pentingnya investasi sejak awal dalam pelatihan tenaga kerja dan pendampingan rantai pasok. Warner, Sullivan, dan Hacking (2017) juga menunjukkan bahwa pengembangan usaha lokal memerlukan kemitraan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil melalui pembiayaan UMKM, pemetaan kebutuhan usaha, penguatan kapasitas, dan pembentukan lingkungan kelembagaan yang kondusif. Sementara itu, Wilson (2022) menegaskan bahwa program tanggung jawab sosial akan lebih efektif apabila masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Berdasarkan sintesis tersebut, ekspansi pertambangan dapat dipahami sebagai proses yang mengubah mata pencaharian dan membuka peluang ekonomi baru. Akan tetapi, persyaratan kompetensi industri dapat memunculkan skill mismatch yang membatasi penyerapan tenaga kerja lokal. Keterbatasan akses tersebut kemudian berpotensi menghasilkan pengangguran struktural dan ketimpangan pendapatan. Ketika manfaat ekonomi dipersepsikan tidak adil, perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi kecemburuan, penurunan kepercayaan, dan melemahnya kohesi sosial. Karena itu, keberhasilan transformasi pertambangan sangat ditentukan oleh kemampuan kebijakan lokal menghubungkan peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, penguatan usaha masyarakat, serta distribusi manfaat yang lebih transparan dan merata.

2. Metode Penelitian

2.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami dinamika sosial ekonomi dalam konteks kehidupan nyata masyarakat Desa Samaenre. Pendekatan ini dipilih karena perubahan mata pencaharian, kesempatan kerja, pendapatan, usaha lokal, dan hubungan sosial tidak dapat dipisahkan dari karakter wilayah, sejarah komunitas, posisi perusahaan, dan pengalaman aktor.

Saining et al. (2025) menggunakan studi kasus kualitatif untuk menggali perspektif pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan organisasi nonpemerintah dalam pengelolaan pascatambang. Herdiyanti, Suyanto, dan Mas'udah (2025) menggunakan desain serupa untuk menganalisis transisi mata pencaharian melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap proses dan mekanisme transformasi, bukan sekadar pengukuran perubahan agregat.

2.2 Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Samaenre, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Lokasi dipilih secara purposif karena berada di sekitar wilayah operasional PT Ceria Nugraha Indotama dan mengalami perubahan ekonomi serta sosial yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pertambangan.

Fokus penelitian mencakup perubahan mata pencaharian, kesempatan kerja formal, pendapatan, pertumbuhan UMKM, rumah sewa dan jasa, kenaikan biaya hidup, mobilitas penduduk, perubahan gotong royong, kecemburuan sosial, hubungan perusahaan-masyarakat, serta faktor pendorong dan penghambat, khususnya pendidikan, keterampilan, sertifikasi, pengalaman kerja, dan persaingan dengan tenaga kerja pendatang.

2.3 Informan Penelitian

Informan ditentukan melalui purposive sampling berdasarkan pengalaman, pengetahuan, posisi, dan keterlibatannya dalam fenomena. Enam informan terdiri atas petani, pekerja tambang, pelaku usaha rumah tangga, ibu rumah tangga, kepala desa, dan perwakilan perusahaan. Komposisi tersebut memungkinkan perbandingan antara penerima manfaat langsung, pelaku usaha pendukung, kelompok non-tambang, pemerintah lokal, dan perusahaan.

Saining et al. (2025) menyeleksi informan dari berbagai pemangku kepentingan agar perbedaan kepentingan dapat dibandingkan, sedangkan Tenkorang (2023) melibatkan aktor adat, pemerintah, bisnis, dan rumah tangga dalam studi pertambangan. Kecukupan data dinilai melalui pengulangan tema dan tidak munculnya informasi substantif baru. Bagherpasandi et al. (2025) menggunakan kejenuhan sebagai dasar penghentian wawancara, sementara Mohd Yusof et al. (2025) memperkuat penilaian tema melalui member checking.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada aktivitas ekonomi desa, usaha perdagangan, rumah sewa, pola interaksi sosial, kondisi ruang, dan mobilitas pekerja. Wawancara mencakup kondisi sebelum dan setelah pertambangan, pendapatan, peluang usaha, biaya hidup, akses rekrutmen, keterampilan, gotong royong, kepercayaan, dan harapan terhadap pemerintah serta perusahaan.

Dokumentasi meliputi profil desa, data penduduk, pendidikan, mata pencaharian, foto, dan dokumen terkait. Kombinasi wawancara, observasi, dan dokumen digunakan Herdiyanti, Suyanto, dan Mas'udah (2026) untuk mengkaji rehabilitasi pascatambang dan oleh Dilay, Diduck, dan Patel (2020) untuk menganalisis konflik serta keadilan lingkungan.

2.5 Analisis dan Keabsahan Data

Analisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Transkrip dibaca berulang, dikodekan, dan dikelompokkan ke dalam tema perubahan mata pencaharian, pendapatan, efek pengganda, biaya hidup, skill mismatch, rekrutmen,

gotong royong, kecemburuan, serta hubungan perusahaan-masyarakat. Data kemudian disajikan dalam uraian tematik dan matriks perbandingan antarinforman. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Informasi petani, pekerja, pelaku usaha, rumah tangga, pemerintah desa, dan perusahaan dibandingkan, lalu diverifikasi dengan observasi dan dokumentasi. Abadi (2023) menerapkan analisis Miles dan Huberman dalam studi komunitas penambang timah, sedangkan Saining et al. (2025) menggunakan pengodean deduktif-induktif serta triangulasi sumber.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Transformasi Sosial Ekonomi Desa Samaenre

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran PT Ceria Nugraha Indotama telah mengubah struktur kehidupan masyarakat Desa Samaenre secara nyata, tetapi tidak merata. Pertambangan menciptakan pekerjaan formal, meningkatkan pendapatan pekerja, dan memperluas perdagangan serta jasa. Pada saat yang sama, sebagian masyarakat tetap bertahan pada perkebunan, tidak memiliki akses langsung terhadap pekerjaan tambang, atau hanya mengalami dampak tidak langsung berupa kenaikan harga dan perubahan hubungan sosial.

Data desa menunjukkan bahwa dari 1.102 penduduk, sebanyak 324 orang bekerja sebagai petani kebun, 310 orang sebagai karyawan swasta atau buruh tambang, 100 orang sebagai pedagang atau pelaku UMKM, 67 orang sebagai nelayan, 22 orang sebagai aparatur negara atau profesi formal lainnya, dan 279 orang berada pada sektor domestik, belum bekerja, atau berstatus ibu rumah tangga. Komposisi ini menunjukkan pertambangan telah menjadi pusat ekonomi baru, tetapi pertanian tetap penting dan jumlah penduduk yang belum terserap produktif masih tinggi.

Tabel 1. Distribusi Penduduk Desa Samaenre Berdasarkan Mata Pencarian Utama

No.	Mata Pencarian Utama	Jumlah
1	Petani kebun	324
2	Karyawan swasta/buruh tambang	310
3	Pedagang/pelaku UMKM	100
4	Nelayan/sektor perikanan	67
5	PNS/guru/TNI/Polri	22
6	Domestik/belum bekerja/IRT	279

Sumber: Kantor Desa Samaenre, 2025.

Perubahan pengalaman informan memperlihatkan tiga pola adaptasi: mobilitas sektoral dari perkebunan ke tambang, diversifikasi melalui usaha rumah tangga, dan keberlanjutan pada pekerjaan lama. Temuan tersebut sejalan dengan Mishra dan Pujari (2008) serta Oladeji, Thomas, dan Ige (2010), yang menunjukkan bahwa pertambangan mendorong perpindahan dari pertanian sekaligus melahirkan usaha pendukung, tetapi dapat melemahkan basis ekonomi tradisional.

3.2 Perubahan Mata Pencarian dan Pendapatan

Pendorong utama perpindahan tenaga kerja adalah keinginan memperoleh pendapatan yang stabil. Perkebunan bergantung pada musim dan harga komoditas, sedangkan pekerjaan perusahaan memberikan upah bulanan dan tunjangan. Informan RO menjelaskan:

“Perbedaannya sangat signifikan, dahulu ketika saya masih fokus mengelola perkebunan, pendapatan yang diperoleh benar-benar tidak menentu. Apabila terjadi perubahan musim atau penurunan harga komoditas cengkeh, kami sangat kesulitan mengatur pemenuhan kebutuhan dapur harian. Oleh karena itu, saat PT CNI membuka lowongan pekerjaan dan saya dinyatakan lolos seleksi, kesempatan tersebut segera saya ambil. Saat ini, setiap bulan sudah ada upah pokok yang secara pasti masuk ke rekening, ditambah dengan tunjangan bonus lainnya. Kondisi finansial keluarga kini jauh lebih stabil dan mapan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan perpindahan pekerjaan merupakan keputusan ekonomi rasional untuk mengurangi ketidakpastian pendapatan. Namun, mobilitas ini tidak terjadi pada seluruh warga. Informan AR menyatakan:

“Saya tidak bekerja di tambang karena kemampuan dan pengalaman saya lebih banyak di pekerjaan kebun. Saya lebih memilih bekerja di kebun karena sudah terbiasa dengan pekerjaan ini dan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja di tambang.”

Pengalaman AR menunjukkan bahwa keberadaan pekerjaan baru tidak otomatis menghasilkan mobilitas. Usia, pendidikan, pengalaman, dan ketidakpahaman terhadap mesin industri membatasi adaptasi. Gräser (2024) menyatakan bahwa tambang industri tidak selalu meningkatkan pekerjaan lokal, sementara Gierańczyk dan Rachwał (2012) menunjukkan bahwa modernisasi dapat menaikkan produksi tanpa pertumbuhan pekerjaan yang setara.

3.3 Multiplier Effect dan Pertumbuhan Usaha Lokal

Aktivitas pertambangan menghasilkan permintaan terhadap makanan, kebutuhan harian, rumah sewa, transportasi, dan jasa. Masuknya pekerja dari dalam dan luar daerah menjadikan aktivitas desa lebih ramai. Informan pelaku usaha menjelaskan:

"Seiring padatnya arus kedatangan karyawan tambang dan menjamurnya rumah sewa di wilayah ini, saya memberanikan diri membuka usaha warung di depan rumah. Alhamdulillah, perputaran modal berjalan sangat cepat dan warung selalu ramai pembeli dari pagi hingga malam. Hasil perdagangan ini sangat membantu meningkatkan pendapatan tunai untuk biaya pendidikan anak serta tabungan keluarga."

Temuan memperlihatkan manfaat tidak langsung melalui konsumsi pekerja dan pertumbuhan pasar. Bainton dan Jackson (2020) menunjukkan proyek tambang dapat menciptakan banyak bisnis lokal, sedangkan Adebayo dan Werker (2021) mengidentifikasi pekerjaan, transfer keuangan, dan kesempatan kontrak sebagai saluran pembagian manfaat. Namun, Fleming-Muñoz dan Poruschi (2025) mengingatkan bahwa limpahan dapat melemah ketika operasi menjadi kurang padat karya. Karena itu, usaha lokal perlu diarahkan pada diversifikasi dan keterhubungan dengan rantai pasok yang berkelanjutan.

3.4 Kenaikan Biaya Hidup dan Ketimpangan Daya Beli

Manfaat ekonomi pekerja tambang dan pelaku usaha tidak dinikmati kelompok non-tambang pada tingkat yang sama. Peningkatan peredaran uang memperbesar permintaan dan mendorong kenaikan harga kebutuhan. Rumah tangga yang pendapatannya tidak berubah menghadapi tekanan lebih besar. Informan RH menyatakan:

"Bagi kami yang tidak memiliki anggota keluarga di sektor pertambangan, kondisi ini dirasa cukup berat. Tidak dipungkiri bahwa desa menjadi lebih ramai dan mengalami kemajuan fisik. Akan tetapi, dampak sekunder yang kami rasakan adalah lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar lokal semenjak aktivitas tambang dimulai. Kelompok pekerja tambang mungkin tidak terbebani karena tingkat pendapatan mereka tinggi, namun suami saya hanya seorang petani kebun biasa yang pendapatannya tidak meningkat. Hal ini tentu saja menghimpit alokasi pengeluaran domestik keluarga karena biaya hidup harian di desa menjadi jauh lebih mahal."

Pernyataan tersebut menunjukkan polarisasi daya beli. Pekerja tambang mampu menyesuaikan konsumsi karena pendapatannya meningkat, sedangkan petani dan rumah tangga non-tambang menanggung kenaikan harga tanpa kompensasi pendapatan. Deaton dan Niman (2012) menemukan bahwa pekerjaan tambang dapat menurunkan kemiskinan dalam jangka pendek tetapi efek tertundanya dapat meningkatkan kemiskinan. Tleuberdinova et al. (2024) juga menunjukkan kesenjangan upah ekstraksi dan pertanian yang menciptakan perbedaan kesejahteraan.

3.5 Skill Mismatch dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Hambatan paling penting adalah ketidakcocokan antara kompetensi tenaga kerja lokal dan persyaratan industri. Dari 1.102 penduduk, 345 orang menamatkan sekolah dasar, 255 orang sekolah menengah pertama, 272 orang SMA/SMK, dan hanya 54 orang berpendidikan diploma atau sarjana. Kondisi tersebut membatasi jumlah calon pekerja yang memenuhi kualifikasi teknis dan administratif.

Tabel 2. Distribusi Penduduk Desa Samaenre Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	176
2	Tamat SD/ sederajat	345
3	Tamat SMP/ sederajat	255
4	Tamat SMA/ SMK/ sederajat	272
5	Diploma/ sarjana	54

Sumber: Kantor Desa Samaenre, 2025.

Pihak perusahaan menyatakan masyarakat lokal diprioritaskan selama memenuhi persyaratan posisi. Informan CR menjelaskan:

"PT CNI menerapkan proses rekrutmen tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan dan berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap posisi. Setiap pelamar harus memenuhi persyaratan administrasi, keterampilan, dan kompetensi yang telah ditetapkan perusahaan. Masyarakat lokal tetap diprioritaskan dalam penerimaan tenaga kerja selama memenuhi persyaratan perusahaan."

Dari perspektif perusahaan, standar pendidikan, pengalaman, mekanisasi, dan keselamatan dibutuhkan untuk mengurangi risiko. Dari perspektif masyarakat, standar tersebut menjadi pembatas struktural ketika pelatihan dan sertifikasi belum tersedia. Ba dan Jacquet (2022) menjelaskan industri ekstraktif sebagai sektor padat modal dengan pekerjaan lokal terbatas. Geenen (2019) menegaskan bahwa akses pekerjaan dapat menghasilkan eksklusivitas baru. Skill mismatch karena itu bukan sekadar kekurangan individu, tetapi kesenjangan kelembagaan antara kebutuhan industri dan sistem pengembangan tenaga kerja lokal.

3.6 Perubahan Relasi Sosial, Gotong Royong, dan Kecemburuan

Transformasi ekonomi mengubah pola hubungan masyarakat. Mobilitas penduduk meningkat dan interaksi dengan pendatang meluas, tetapi gotong royong melemah, orientasi individual menguat, dan perbandingan sosial berdasarkan pekerjaan serta pendapatan semakin tampak. Informan AR menyatakan:

"Suasana desa memang jadi ramai, tapi hubungan antarwarga sekarang agak berubah kalau saya perhatikan. Kendala yang dirasakan biasanya muncul kecemburuan sosial di masyarakat karena tidak semua masyarakat bisa bekerja di perusahaan."

Kepala desa menyampaikan penilaian serupa:

"Timbul kecemburuan sosial di tengah masyarakat, terutama terkait kesempatan kerja. Ada masyarakat yang merasa belum memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja di perusahaan sehingga menimbulkan perbedaan pendapatan di masyarakat."

Kecemburuan berlangsung secara horizontal antara warga yang terserap dan tidak terserap, serta secara vertikal terhadap perusahaan. Speller dan Twigger-Ross (2009) menunjukkan bahwa perubahan lingkungan komunitas tambang dapat melemahkan identitas kolektif. Hui (2025) menemukan bahwa distribusi kekayaan yang tidak merata memunculkan kecemburuan, sedangkan Kwaleyela dan Larmer (2026) menghubungkan konflik dengan pembagian manfaat yang dipersepsikan tidak adil. Dengan demikian, melemahnya gotong royong bukan semata akibat modernisasi, tetapi berkaitan dengan posisi ekonomi warga yang semakin berbeda.

3.7 Sintesis Temuan dan Implikasi Kebijakan

Pertambangan menghasilkan transformasi asimetris melalui dua jalur. Jalur pertama dinikmati pekerja formal dan pelaku usaha yang memperoleh pendapatan stabil, peluang akumulasi, dan perbaikan kesejahteraan. Jalur kedua dialami kelompok non-tambang, tenaga kerja tanpa keterampilan, petani lanjut usia, dan rumah tangga tanpa modal usaha yang menghadapi kenaikan biaya hidup dan keterbatasan akses.

Temuan utama adalah posisi skill mismatch sebagai mekanisme yang menghubungkan perubahan ekonomi dan sosial. Ekspansi tambang menciptakan pekerjaan, tetapi pekerjaan membutuhkan pendidikan, sertifikasi, pengalaman, dan kemampuan teknis. Ketika masyarakat tidak memenuhi persyaratan, muncul pengangguran struktural dan ketimpangan akses. Ketimpangan kesempatan kemudian menghasilkan perbedaan pendapatan, kecemburuan, penurunan kepercayaan, dan pelemahan kohesi.

Kebijakan karena itu perlu bergerak melampaui penyediaan lowongan. Pelatihan vokasional, sertifikasi K3 dan teknis, magang, transparansi rekrutmen, pendampingan UMKM, pembiayaan, pengadaan lokal, forum komunikasi, dan CSR partisipatif perlu dipadukan. Ba dan Jacquet (2022), Scott dan Gaskin-Peters (2022), serta Wilson (2022) menegaskan bahwa pekerjaan lokal dan program sosial lebih efektif bila kapasitas masyarakat dibangun sejak awal dan komunitas terlibat dalam perencanaan.

4. Kesimpulan

Aktivitas pertambangan PT Ceria Nugraha Indotama telah mendorong perubahan sosial ekonomi yang nyata di Desa Samaenre. Transformasi tersebut terlihat dari beralihnya sebagian tenaga kerja dari sektor pertanian dan perkebunan menuju pekerjaan tambang, meningkatnya kestabilan pendapatan pekerja, serta berkembangnya usaha pendukung seperti warung, perdagangan, rumah sewa, transportasi, dan jasa lokal. Bagi masyarakat yang berhasil memasuki pekerjaan formal atau mampu memanfaatkan pertumbuhan permintaan lokal, pertambangan membuka peluang peningkatan kesejahteraan dan memperkuat kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, manfaat ekonomi tersebut belum terdistribusi secara merata. Masyarakat yang tetap bergantung pada pertanian, tidak memiliki anggota keluarga yang bekerja di perusahaan, atau tidak mempunyai modal untuk mengembangkan usaha menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup tanpa peningkatan pendapatan yang sebanding. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah lingkaran tambang belum sepenuhnya bersifat inklusif karena menghasilkan kesenjangan daya beli antara kelompok yang terhubung langsung dengan aktivitas pertambangan dan kelompok yang berada di luar sektor tersebut.

Terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal terutama berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kompetensi masyarakat dan kebutuhan industri. Tingkat pendidikan, keterampilan teknis, pengalaman kerja, sertifikasi, dan penguasaan standar keselamatan menjadi faktor penting dalam proses rekrutmen. Sementara itu, tenaga kerja pendatang yang telah memiliki pengalaman dan kualifikasi lebih sesuai cenderung lebih siap memenuhi kebutuhan perusahaan. Temuan ini menempatkan skill mismatch sebagai mekanisme utama yang menghubungkan perubahan struktur ekonomi dengan pengangguran struktural, ketimpangan kesempatan kerja, dan perbedaan pendapatan.

Transformasi ekonomi juga diikuti oleh perubahan hubungan sosial. Perbedaan pekerjaan, pendapatan, dan akses terhadap manfaat perusahaan memunculkan kecemburuan, mengubah pola interaksi antarwarga, dan mengurangi intensitas gotong royong. Ketidakpuasan semakin kuat ketika masyarakat merasa belum memperoleh kesempatan kerja yang setara atau tidak memahami proses rekrutmen secara jelas. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa skill mismatch bukan hanya persoalan ketenagakerjaan, melainkan penghubung antara perubahan mata pencaharian, eksklusi kerja, ketimpangan pendapatan, kecemburuan sosial, penurunan kepercayaan, dan pelemahan kohesi masyarakat.

Implikasi praktis penelitian ini menuntut keterlibatan terpadu pemerintah daerah, pemerintah desa, perusahaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pemetaan kompetensi tenaga kerja lokal berdasarkan pendidikan, keterampilan, pengalaman, usia produktif, dan kebutuhan pelatihan, kemudian menghubungkannya dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja perusahaan. PT Ceria Nugraha Indotama perlu memperluas pelatihan vokasional, program magang, sertifikasi teknis, dan pelatihan keselamatan kerja melalui kemitraan dengan balai latihan kerja, sekolah kejuruan, perguruan tinggi, dan lembaga sertifikasi profesi.

Transparansi rekrutmen juga perlu diperkuat melalui penyampaian informasi mengenai posisi, persyaratan, tahapan seleksi, dan hasil penerimaan. Pemerintah desa dapat berperan sebagai mitra penyebaran informasi dan fasilitator komunikasi tanpa menggantikan kewenangan profesional perusahaan. Pada sisi usaha lokal, pengembangan UMKM perlu diarahkan pada penguatan manajemen, akses pembiayaan, legalitas, standarisasi, pemasaran digital, dan peluang pengadaan lokal agar usaha tidak hanya bergantung pada konsumsi pekerja tambang. Program CSR sebaiknya diprioritaskan pada pemberdayaan jangka panjang, termasuk beasiswa teknis, pelatihan kerja, pengembangan pemasok lokal, bantuan modal produktif, dan penguatan sektor pertanian.

Untuk menjaga hubungan sosial, pemerintah desa dan perusahaan perlu membentuk forum komunikasi multipihak yang berfungsi menyampaikan kebutuhan tenaga kerja, mengevaluasi program sosial, menampung pengaduan, dan menyelesaikan kesalahpahaman sebelum berkembang menjadi konflik. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan metode campuran untuk mengukur perubahan pendapatan, biaya hidup, tingkat ketimpangan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kohesi sosial secara lebih terukur.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Samaenre, PT Ceria Nugraha Indotama, serta seluruh informan yang telah memberikan waktu, informasi, dan dukungan selama pelaksanaan penelitian ini.

Reference

- Abadi, M. (2023). The relationship between Confucianism and materialism with environmentalism awareness among Tionghoa tin miners in the Bangka Belitung. *Malaysian Journal of Qualitative Research*, 9(2). <https://doi.org/10.61211/mjqr090210>
- Adebayo, E., & Werker, E. (2021). How much are benefit-sharing agreements worth to communities affected by mining? *Resources Policy*, 71, 101970. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101970>
- Ba, D. G., & Jacquet, J. B. (2022). Local content policies in West Africa's mining sector: Assessment and roadmap to success. *The Extractive Industries and Society*, 9, 101030. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.101030>
- Bagherpasandi, M., Salehi, M., Hajiha, Z., & Hejazi, R. (2025). A model of increasing performance in sustainable supply chain management. *The TQM Journal*, 37(3), 653–679. <https://doi.org/10.1108/TQM-05-2023-0128>
- Bainton, N., & Jackson, R. T. (2020). Adding and sustaining benefits: Large-scale mining and landowner business development in Papua New Guinea. *The Extractive Industries and Society*, 7(2), 366–375. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.10.005>
- Buu-Sao, D. (2018). Indigenous and entrepreneurs: Capitalism in the village. *Sociologie du Travail*, 60(3). <https://doi.org/10.4000/sdt.2705>
- Calzada Olvera, B. (2024). Is the Dutch disease well and alive? A cross-country assessment of mining spillovers on employment in the 2002–2014 period. *Resources Policy*, 95, 105136. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105136>
- Deaton, B. J., & Niman, E. (2012). An empirical examination of the relationship between mining employment and poverty in the Appalachian region. *Applied Economics*, 44(3), 303–312. <https://doi.org/10.1080/00036846.2010.505558>
- Díaz, G. A. H. (2025). Macroeconomic vulnerabilities in Colombia's low-carbon transition. *Desarrollo y Sociedad*, 2025(100), 97–119. <https://doi.org/10.13043/DYS.100.5>
- Dilay, A., Diduck, A. P., & Patel, K. (2020). Environmental justice in India: A case study of environmental impact assessment, community engagement and public interest litigation. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 38(1), 16–27. <https://doi.org/10.1080/14615517.2019.1611035>
- Fleming-Muñoz, D. A., & Poruschi, L. (2025). Local economic impacts of an unconventional energy boom: A long-term evaluation. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 69(3), 501–509. <https://doi.org/10.1111/1467-8489.70031>
- Foo, N., & Salim, R. (2022). The evolution of mining employment during the resource boom and bust cycle in Australia. *Mineral Economics*, 35(2), 309–324. <https://doi.org/10.1007/s13563-022-00320-8>
- Gatune, J. (2024). Engaging the private sector for inclusive extractive industries and sustainable value chains in Africa: A look at local content policy and practice in Africa. In H. Besada, C. D'Alessandro, & T. Golla (Eds.), *Routledge handbook of natural resource governance in Africa* (pp. 338–355). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003017479-28>
- Geenen, S. (2019). Gold and godfathers: Local content, politics, and capitalism in extractive industries. *World Development*, 123, 104605. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.06.028>
- Gierańczyk, W., & Rachwał, T. (2012). Structural changes in the industry of Poland against the background of Eastern European Union states. *Quaestiones Geographicae*, 31(2), 83–93. <https://doi.org/10.2478/v10117-012-0021-9>
- Gräser, M. (2024). Industrial versus artisanal mining: The effects on local employment in Liberia. *Journal of Rural Studies*, 111, 103389. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103389>
- Herdianti, Suyanto, B., & Mas'udah, S. (2025). Post-mining livelihood transitions and agroecological adaptation: A study of tin communities in Bangka Belitung, Indonesia. Development in Practice. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/09614524.2025.2607620>
- Herdianti, Suyanto, B., & Mas'udah, S. (2026). Sustainable rehabilitation of post-mining land through community-driven ecological practices in Bangka Belitung, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1580(1), 012040. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1580/1/012040>
- Hui, Z. (2025). Windfall wealth and envy in contemporary China. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003636243>
- Jiao, W., Zhang, X., Li, C., & Guo, J. (2021). Sustainable transition of mining cities in China: Literature review and policy analysis. *Resources Policy*, 74, 101867. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101867>
- Korinek, J., & De Sa, P. (2023). Local content policies in the mining sector. In L. Y. Ing & G. M. Grossman (Eds.), *Local content requirements: Promises and pitfalls* (pp. 48–86). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003415794-3>
- Kowasch, M. (2018). Nickel mining in northern New Caledonia—A path to sustainable development? *Journal of Geochemical Exploration*, 194, 280–290. <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2018.09.006>
- Kwaleyela, L., & Larmer, M. (2026). Social change and social conflict in Zambian Copperbelt mine communities. *Resources Policy*, 112, 105815. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105815>
- Machlis, G. E., Force, J. E., & Balice, R. G. (1990). Timber, minerals, and social change: An exploratory test of two resource-dependent communities. *Rural Sociology*, 55(3), 411–424. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.1990.tb00691.x>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. ISBN 978-1-4522-5787-7.
- Mishra, P. P., & Pujari, A. K. (2008). Impact of mining on agricultural productivity: A case study of the Indian state of Orissa. *South Asia*

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12277>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

-
- Economic Journal, 9(2), 337–350. <https://doi.org/10.1177/139156140800900204>
- Mohd Yusof, W. Z., Muhamad Tamyaz, P. F., Syed Radzi, R., & Haron, H. (2025). Design-driven sustainable business model innovation: The case of the Malaysian furniture industry. *International Journal of Technology Management and Sustainable Development*, 24(2), 209–229. https://doi.org/10.1386/tmsd_00103_1
- Nelsen, J. L., Scoble, M., & Ostry, A. (2010). Sustainable socio-economic development in mining communities: North-central British Columbia perspectives. *International Journal of Mining, Reclamation and Environment*, 24(2), 163–179. <https://doi.org/10.1080/17480930903185107>
- Nguyen, B. N., Boruff, B., & Tonts, M. (2018). Indicators of mining in development: A Q-methodology investigation of two gold mines in Quang Nam Province, Vietnam. *Resources Policy*, 57, 147–155. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.02.014>
- Oladeji, J. O., Thomas, K. A., & Ige, S. O. O. (2010). Impacts of mining on income generating activities of rural dwellers in Itesiwaju local government area of Oyo State, Nigeria. *International Journal of Applied Environmental Sciences*, 5(6), 889+. <https://link.gale.com/apps/doc/A323258167/AONE?u=anon-a1ace558&sid=googleScholar&xid=05b76e99>
- Poudyal, N. C., Gyawali, B. R., Pokharel, B., Khanal, A. R., & Paudel, K. (2025). Socioeconomic legitimacy of surface mining: Assessing the role of environmental change, trust, and reclamation satisfaction in Southern Appalachia of Kentucky, USA. *Society & Natural Resources*, 38(5), 414–438. <https://doi.org/10.1080/08941920.2024.2443913>
- Saining, A., Udiansyah, Istikowati, W. T., & Sukarna, R. M. (2025). Stakeholder perspectives on sustainable forest management and conservation in post-coal mining landscapes of PT Asmin Bara Bronang, Kapuas Regency, Central Kalimantan. *Environment and Ecology Research*, 13(5), 705–715. <https://doi.org/10.13189/eer.2025.130509>
- Scott, S., & Gaskin-Peters, N. (2022). The importance of early investments in local content: Lessons learned from Guyana's Enterprise Development Centre five years in. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers. <https://doi.org/10.2118/210444-MS>
- Speller, G. M., & Twigger-Ross, C. L. (2009). Cultural and social disconnection in the context of a changed physical environment. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 91(4), 355–369. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2009.00327.x>
- Suutarinen, T. (2015). Local natural resource curse and sustainable socio-economic development in a Russian mining community of Kovdor. *Fennia*, 193(1), 99–116. <https://doi.org/10.11143/45316>
- Tenkorang, E. Y. (2023). Environmental governance in gold mining: The role of traditional institutions in Asutifi North District of Ghana. *SAGE Open*, 13(2). <https://doi.org/10.1177/21582440231178175>
- Tleuberdinova, A., Nurlanova, N., Andreyeva, G., & Alzhanova, F. (2024). Regional and sectoral wage disparities as a reflection of inequality: The case of Kazakhstan. *Problems and Perspectives in Management*, 22(4), 444–459. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(4\).2024.33](https://doi.org/10.21511/ppm.22(4).2024.33)
- Warner, M., Sullivan, R., & Hacking, T. (2004). Konkola Copper Mines plc, Zambia: Local business development and partnerships. In *Putting partnerships to work: Strategic alliances for development between government, the private sector and civil society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351281249-9>
- Wilson, S. A. (2022). Measuring the effectiveness of corporate social responsibility initiatives in diamond mining areas of Sierra Leone. *Resources Policy*, 77, 102651. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102651>